

STUDI EKSPLORATIF TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI PAUD: PEMAHAMAN, PRAKTIK, DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI GURU

Nova Sari¹, Khairiah²

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan An-Nur Nanggroe Aceh Darussalam¹,
Universitas Syiah Kuala²
e-mail: ova_mazda@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif di lapangan, serta hambatan dan harapan yang muncul dari para pendidik, khususnya di lingkungan PAUD. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di beberapa lembaga PAUD inklusif di Kota Banda Aceh, dengan melibatkan empat guru yang berpengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap pendidikan inklusif masih terbatas, yang umumnya dimaknai sebagai sekadar menempatkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler tanpa memperhatikan kebutuhan individual atau adaptasi kurikulum. Implementasi belum berjalan efektif, dengan metode pembelajaran yang cenderung seragam dan kurang mengakomodasi keberagaman anak. Tantangan utama meliputi keterbatasan sarana, rendahnya kualifikasi guru dalam pendidikan inklusif, kurangnya keterlibatan orang tua, serta permasalahan perilaku pada anak berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, para guru memiliki harapan besar terhadap peningkatan praktik pendidikan inklusif, terutama melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan tenaga ahli, dan kolaborasi yang kuat antara guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Pemahaman, Implementasi, Hambatan, PAUD.*

ABSTRACT

Inclusive education at the Early Childhood Education (ECE) level is a strategic effort to create a fair and supportive learning environment for all children, including those with special needs. However, its implementation still faces various challenges. This study aims to examine how inclusive education is implemented in practice, as well as the obstacles and expectations of educators, particularly in ECE settings. This qualitative descriptive research was conducted in several inclusive ECE institutions in Banda Aceh, involving four teachers with experience teaching children with special needs. Data were collected through semi-structured interviews. The findings show that teachers' understanding of inclusive education is still limited, generally interpreted merely as placing children with special needs into regular classes without considering individual needs or adapting the curriculum. Implementation has not been effective, with teaching methods tending to be uniform and less accommodating to children's diversity. The main challenges include limited facilities, low teacher qualifications in inclusive education, lack of parental involvement, and behavioral issues among children with special needs. Nevertheless, teachers have high hopes for improving inclusive education practices, especially through continuous training, support from specialists, and strong collaboration among teachers, parents, and other relevant stakeholders.

Keywords: *Inclusive Education, Understanding, Implementation, Challenges, ECE.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan harus diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Namun, penelitian Fitria (2024) mencatat bahwa meskipun telah diberlakukan kebijakan inklusif, kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kompetensi guru, dan kurangnya dukungan masyarakat. Kajian teoretis ini mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam pendidikan inklusi di PAUD keterbatasan fasilitas, kebutuhan pelatihan guru yang berkelanjutan, dan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab VIII pasal 34 menyebutkan: 1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dengan demikian negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler). Namun, realita di lapangan mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik pendidikan inklusif (Nahampun et al, 2025). Pihak dinas pendidikan belum memiliki wewenang atau kekuatan yang cukup untuk benar-benar mendorong perkembangan pendidikan inklusif di daerah (Muchsini, 2023).

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terdapat 40.164 sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Dengan sekolah inklusif yang tidak sedikit hanya 14,83% memiliki sumber daya yang dapat membimbing ABK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong pendidikan inklusif, namun tidak disertai tenaga ahli yang memadai. Dengan keterbatasan tersebut, akhirnya wali kelas atau guru mata pelajaran menghadapi ABK dengan keterampilan yang kurang memadai (Moningka et al., 2024).

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan sekaligus alternatif pemenuhan hak pendidikan bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan Inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, 2007).

Pendidikan inklusif di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2001, dengan uji coba di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Jakarta. Pada tahun 2004, Indonesia secara formal mendeklarasikan komitmennya terhadap pendidikan inklusif melalui Deklarasi Bandung, yang menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemerintah Aceh, sebagai respons terhadap kebijakan nasional, mulai menerapkan program pendidikan inklusif pada tahun 2007. Langkah ini ditandai dengan

penerbitan Peraturan Gubernur Aceh No. 92/2012, yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di provinsi Aceh. Meskipun telah ada upaya signifikan melalui Peraturan Gubernur No. 92/2012, implementasi sistem inklusi di Aceh masih belum matang khususnya pada aspek budaya inklusif (Haekal, 2021). Laporan dari Juliana (2022) menyatakan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Banda Aceh belum serius. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu bekerja lebih keras untuk membangun fondasi pendidikan inklusif yang kokoh. Pembangunan budaya inklusif menjadi langkah awal yang harus ditempuh sebelum merancang dan melaksanakan kebijakan serta implementasi pendidikan inklusif secara menyeluruh (Haekal, 2021). Banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pedoman bagi pendidik dalam membimbing siswanya (Novrizal & Manaf, 2024).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rawdhah dan Julianto (2017) yang menemukan bahwa penerapan pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi sejumlah kendala di tingkat praktis. Beberapa guru mengeluhkan kesulitan dalam memberikan perhatian lebih kepada siswa ABK karena mereka mengajar sendiri di kelas tanpa dukungan tambahan. Selain itu, kurangnya pemahaman guru tentang anak berkebutuhan khusus serta makna pendidikan inklusif menyebabkan munculnya asumsi bahwa siswa ABK sebaiknya ditempatkan di kelas khusus, terpisah dari siswa reguler. Di sisi lain, guru juga masih mengalami kesulitan dalam menghadapi perilaku "unik" dari siswa berkebutuhan khusus.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, individu berkebutuhan khusus dapat disekolahkan di sekolah inklusif ataupun di sekolah luar biasa dengan mempertimbangkan persyaratan tertentu. Namun, pada jenjang pendidikan anak usia dini, individu berkebutuhan khusus hanya memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu guru PAUD memegang peranan penting dalam keberhasilan penerapan pendidikan inklusif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama terkait pendidikan inklusif di lembaga PAUD. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru PAUD terhadap konsep pendidikan inklusif. Kedua, penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah diterapkan di lembaga PAUD. Ketiga, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi guru dalam menerapkan pendidikan inklusif di lingkungan pembelajaran. Terakhir, penelitian ini juga akan menggali harapan guru PAUD terhadap implementasi pendidikan inklusif di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemahaman guru PAUD terhadap pendidikan inklusif, praktik pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, serta harapan terhadap implementasi pendidikan inklusif di masa depan. Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali data secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat diperoleh informasi yang kaya dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2025 di empat lembaga PAUD inklusif yang berada di Kota Banda Aceh, yaitu PAUD Intan Payong, PAUD Permata Hati, PAUD Harsya Ceria, dan PAUD Sukma. Subjek penelitian terdiri dari empat orang guru yang masing-masing berasal dari lembaga PAUD berbeda dan memiliki pengalaman mengajar anak

berkebutuhan khusus. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi empat aspek utama:

1. Pemahaman guru tentang pendidikan inklusif.
2. Praktik pelaksanaan pendidikan inklusif di PAUD.
3. Hambatan yang dihadapi guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus.
4. Harapan guru terhadap implementasi pendidikan inklusif ke depan.

Pedoman wawancara disusun secara fleksibel agar peneliti dapat menggali informasi tambahan sesuai dengan arah pembicaraan saat wawancara berlangsung. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara dan catatan lapangan untuk mendukung dokumentasi data.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara langsung kepada masing-masing guru di tempat mereka mengajar. Wawancara direkam dan dicatat untuk keperluan transkripsi dan analisis data. Analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi data, yakni proses penyaringan, pemilahan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara.
2. Penyajian data, yakni pengorganisasian data dalam bentuk naratif deskriptif atau matriks untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni merumuskan temuan utama berdasarkan pola-pola yang muncul dari data serta melakukan verifikasi untuk menjamin keabsahan temuan.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, mencakup identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan proposal, pembuatan instrumen wawancara, dan pengurusan izin penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data, yaitu pelaksanaan wawancara dengan guru PAUD di empat lembaga inklusif dan pencatatan hasil wawancara.
3. Tahap Analisis Data, yang melibatkan proses transkripsi, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.
4. Tahap Pelaporan, yaitu penyusunan laporan akhir penelitian yang berisi temuan, pembahasan, dan simpulan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini melibatkan empat guru dari empat lembaga PAUD inklusif yang berbeda di Kota Banda Aceh, yaitu PAUD Intan Payong, PAUD Permata Hati, PAUD Harsya Ceria, dan PAUD Sukma. Untuk memahami kondisi nyata di masing-masing lembaga, hasil wawancara dikategorikan berdasarkan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif, pelaksanaan praktik pembelajaran inklusif, hambatan yang dihadapi, serta harapan mereka terkait pengembangan pendidikan inklusif di masa depan. Dengan pengelompokan ini, diperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai situasi di setiap PAUD, sekaligus memudahkan identifikasi kebutuhan dan tantangan yang unik di masing-masing lembaga.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai waktu dimulainya pelaksanaan pendidikan inklusif pada masing-masing lembaga PAUD yang menjadi responden dalam penelitian ini. Data ini penting untuk melihat sejauh mana pengalaman dan perkembangan masing-masing lembaga dalam menerapkan pendidikan inklusif.

Tabel 1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Lembaga PAUD

PAUD	Tahun Pelaksanaan Pendidikan Inklusif
Intan Payong	2006
Permata Hati	2018
Harsya Ceria	2021
Sukma	2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PAUD Intan Payong merupakan lembaga paling awal yang melaksanakan pendidikan inklusif, yaitu sejak tahun 2006, yang berarti telah memiliki pengalaman lebih dari satu dekade. Sementara itu, PAUD Permata Hati memulai pada tahun 2018, dan Harsya Ceria pada tahun 2021. PAUD Sukma menjadi yang paling baru dalam mengadopsi pendidikan inklusif, yaitu mulai tahun 2023.

Perbedaan tahun pelaksanaan ini dapat memengaruhi tingkat kesiapan lembaga, pemahaman guru, serta kualitas implementasi pendidikan inklusif di masing-masing PAUD. PAUD yang lebih lama menjalankan pendidikan inklusif cenderung memiliki pengalaman yang lebih kaya, meskipun masih menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaannya.

1. Pemahaman guru PAUD tentang pendidikan inklusif

Keseluruhan responden mengartikan pendidikan inklusif secara sederhana sebagai kebijakan pendidikan yang "menggabungkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler". Namun, pemahaman mereka belum menyentuh aspek penting lain seperti prinsip ketidakupayaan khusus pada anak berkebutuhan khusus dan penyesuaian kurikulum.

"Iya, jadi anak-anak mengikuti proses pembelajaran yang normal sama dengan anak regular lainnya. memakai kurikulum anak-anak normal" (IPR)

"Kurikulum sekolah ini tetap merujuk kurikulum nasional tapi di setiap sekolah punya kurikulum sendiri, nah di kurikulum tersebut kita memasukkan nilai nilai yang memang untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Jadi, tidak ada kurikulum khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus tapi di samakan dengan anak normal lainnya". (HCR)

"Sekolah ini menggunakan kurikulum ikut dinas Pendidikan" (PHR)

2. Pelaksanaan pendidikan inklusif di lembaga PAUD

Dalam praktiknya, sebagian besar guru belum menerapkan pembelajaran yang inklusif secara utuh. Metode pengajaran masih seragam, tanpa penyesuaian khusus untuk kebutuhan individual siswa. Biaya guru pendamping khusus juga dibebankan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus.

"Disekolah tersebut memakai metode sentra untuk semua anak, anak berkebutuhan khusus atau anak normal itu karena belajarnya sambil bermain jadi bisa dipakai untuk anak berkebutuhan khusus dan mereka bisa memakai metode itu, jadi tidak ada metode khusus untuk anak berkebutuhan khusus" (HCR)

"Jika orang tua setuju ditambah guru pendamping khusus saat pembelajaran, ada tambahan biayanya, dan guru pendamping itu dicari oleh pihak sekolah" (PHR).

3. Hambatan dalam menerapkan pendidikan inklusif

Hambatan guru dalam menerapkan pendidikan inklusif di PAUD, ditemui:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif
Menurut responden, fasilitas belajar yang tersedia masih sangat terbatas. Misalnya kondisi ruang kelas yang sempit dan kurang nyaman. Hal ini menyulitkan guru dalam menyusun kegiatan belajar yang variatif dan menyenangkan.
“Untuk sarana prasarana tidak ada, hanya lingkungan ramah anak yang tersedia” (PHR)
“Untuk sarana dan prasarana belum memadai untuk sekolah inklusif karna bangunannya masih di sewa jadi harus memanfaatkan ruangan ruangan yang sudah ada atau kondisi bangunan yang sudah ada, tapi bukan berarti kami tidak bisa mensiasatinya. Maka oleh karena itu setiap ruangan di siasati selalu ada pintu pembatas dan kuncinya” (HCR)
- b. Kualifikasi Guru belum memadai
Beberapa guru PAUD belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, misalnya tidak berasal dari jurusan PAUD juga bukan lulusan pendidikan luar biasa. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang perkembangan anak usia dini serta metode pembelajaran yang kurang tepat.
“Perlu adanya peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan wawasan guru terhadap Pendidikan inklusif” (PHR)
“Tantangannya belum ada satu gurupun yang datang (menjadi guru) sudah siap dengan kemampuan pendampingan anak berkebutuhan khusus karna kesiapan guru itu perlu, sehingga ketika membutuhkan guru pendamping guru tersebut belum ada siap untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus” (HCR)
- c. Minimnya keterlibatan orang tua
Responden juga mengeluhkan rendahnya partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan belajar anak di rumah maupun di sekolah.
“Saat waktu bersama orang tua dukungannya kurang kuat tidak semua orang tua punya waktu untuk memberi dukungan bagi anak-anaknya” (IPR)
- d. Masalah perilaku anak Berkebutuhan khusus
Anak usia dini memiliki karakteristik yang sangat beragam. Ditambah lagi dengan kondisi berkebutuhan khusus pada anak usia dini menjadi tantangan lebih bagi guru dalam menangani anak-anak yang berkemungkinan mengalami hambatan perkembangan fisik, intelektual, emosi dan tingkah laku tanpa dukungan tenaga ahli yang mencukupi.
“Kondisi anak berkebutuhan khusus yang beraneka ragam menjadi tantangan tersendiri bagi guru” (PHR)
“disini ada anak ADHD, speechdelay dan downsyndrom mereka paham apa yang kami katakan, tapi mereka tidak tau komunikasi dua arah itu bagaimana” (SMR).

4. Harapan guru PAUD terhadap implementasi pendidikan inklusif

- a. Harapan Akan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
Sebagian besar guru menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Mereka berharap adanya pelatihan khusus.
“perlu pelatihan kepada guru tentang penanganan anak berkebutuhan khusus” (PHR)
“Tidak ada. Kita belajar secara otodidak” (IPR)

“Kami pernah ikut tentang pelatihan pendidikan inklusif tapi terbatas tidak semua guru bisa mendapatkan pelatihan itu. Harapan saya pemerintah bisa memberikan pelatihan khusus namun tidak singkat karna ilmu untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa seminggu dua minggu, karna tidak bisa hanya mendapatkan materi hanya seminggu atau dua minggu, sehingga setiap sekolah punya tenaga pendidik yang paham tentang penanganan anak yang berkebutuhan khusus” (HCR)

b. Harapan Adanya Ketersediaan Tenaga Ahli dan Kolaborasi yang Kuat

Tidak semua sekolah menyediakan tenaga ahli seperti psikolog. Guru mengharapkan adanya tenaga ahli seperti dokter dan psikolog yang dapat membantu mendiagnosa dan memberikan terapi terhadap hambatan perkembangan anak. Guru berharap adanya kerjasama antara guru, orang tua, tenaga medis, dan instansi terkait dalam mendukung pendidikan inklusif. Mereka menilai bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak bisa hanya dibebankan kepada guru.

“Saya berharap ada kerja sama dengan orang tua dan ahli, karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Anak-anak ini butuh pendekatan yang khusus. Kita berharap dukungan lebih dirumah dengan menerapkan pola yang sama dalam lingkungan keluarganya” (IPR)

“Tidak semua orang tua terbuka dengan kondisi anak” (HCR)

“Di sini pendamping khusus ada, untuk tenaga ahli tidak ada” (PHR)

c. Harapan Terwujudnya Keadilan bagi Semua Anak

Guru menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar dan berkembang bersama teman-temannya. Mereka berharap bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan secara adil.

“Harapan kami semua sekolah wajib menerima anak-anak yang memiliki gangguan perkembangan dan memberikan stimulasi, siapapun harus menerima kehadiran anak dengan kondisi yang Istimewa dengan melihat sudut pandang positifnya” (IPR)

“Terwujudnya pendidikan inklusif yang tidak hanya bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membentuk generasi yang lebih toleran, peduli, dan menghargai keberagaman” (SMR).

Pembahasan

Pendidikan inklusif bukan sekadar penggabungan fisik, tetapi menyesuaikan lingkungan pembelajaran agar setiap anak dapat mengakses proses belajar sesuai kebutuhannya. UNESCO (2021) mendeskripsikan pendidikan inklusif sebagai strategi yang mengubah struktur pendidikan dan atmosfer pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Kebijakan pendidikan inklusif sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil, serta menyoroti kebutuhan akan sumber daya (anggaran, tenaga pengajar, dan infrastruktur), regulasi pendukung, dan perencanaan pelaksanaan berdasarkan waktu, lokasi, dan anggaran (Novrizal dan Manaf, 2024). Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar di mana guru dan siswa menyambut perbedaan, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berhasil. Hal ini sejalan dengan Septy Nurfadhillah (2021:22) menjelaskan tujuan pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu: memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya dan menciptakan amanat

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Kurikulum diferensiatif dan Individualized Learning Program penting sebagai bagian dari inklusif semestinya diterapkan sejak dini. Fitria et al. (2024) juga menegaskan bahwa strategi adaptif dan desain kurikulum inklusif masih sangat dibutuhkan karena banyak guru masih menggunakan satu kurikulum nasional tanpa modifikasi untuk ABK.

Pembelajaran inklusif memerlukan strategi pedagogis yang fleksibel, seperti diferensiasi tugas dan metode bermain edukatif yang sesuai dengan profil individu anak. Patilima et al (2024) juga menekankan perlunya inovasi seperti pembelajaran adaptif dan teknologi bantu untuk mendukung inklusi secara praktis karena implementasi selama ini mengalami kendala kompetensi dan sarana.

Secara teori, pendidikan inklusif menuntut guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mendalam dalam menangani keberagaman peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru PAUD belum memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau pelatihan khusus inklusi. Penelitian Pasingih (2024) menunjukkan bahwa mayoritas guru PAUD di Indonesia belum mengikuti pelatihan pendidikan inklusif yang memadai. Sebagian besar hanya belajar melalui pengalaman pribadi atau pelatihan singkat yang tidak aplikatif.

Lingkungan pembelajaran yang inklusif harus didukung oleh fasilitas fisik yang ramah terhadap kebutuhan semua anak. Dalam penelitian lapangan, guru menyampaikan bahwa bangunan yang disewa, ruang kelas yang sempit, dan tidak adanya alat bantu menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembelajaran yang adaptif. Putri & Jailani (2024) menyebutkan bahwa infrastruktur yang tidak mendukung akan menyulitkan guru dalam menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Tanpa sarana yang memadai, aksesibilitas fisik dan psikologis terhadap proses pembelajaran tidak akan tercapai

Selanjutnya, Keterlibatan keluarga merupakan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Sayangnya, beberapa guru menyampaikan bahwa orang tua cenderung tidak aktif atau kurang memahami kebutuhan anak mereka, terutama terkait proses belajar di rumah. Kolaborasi yang lemah antara guru dan orang tua dapat menghambat kontinuitas stimulasi anak berkebutuhan khusus antara rumah dan sekolah, sehingga memperlambat perkembangan anak (Abubakar et al, 2024)

Dalam konteks PAUD, anak berkebutuhan khusus menunjukkan spektrum karakteristik yang luas. Tanpa kehadiran tenaga ahli (psikolog, terapis), guru menghadapi kesulitan dalam melakukan asesmen dan intervensi yang tepat. Menurut Smith et al. (2020), setiap ABK memerlukan pendekatan pembelajaran dan strategi manajemen kelas yang individual dan fleksibel, yang tidak selalu mampu dijalankan oleh guru reguler tanpa pelatihan dan dukungan profesional. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran inklusif hanya efektif jika guru memahami prinsip *Universal Design for Learning (UDL)*, Program Pembelajaran Individual, dan strategi diferensiasi pembelajaran.

KESIMPULAN

Secara umum, pemahaman guru PAUD terhadap pendidikan inklusif masih bersifat konseptual, belum menyeluruh hingga ke aspek praktik dan implementasi teknis. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan penguatan kapasitas guru agar pendidikan inklusif dapat terlaksana secara optimal di lembaga PAUD. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan guru dalam melaksanakan pendidikan

Copyright (c) 2025 EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran

inklusif di PAUD bersifat multidimensi, mencakup aspek sarana, kompetensi dan sosial. Kurangnya pelatihan bagi guru menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui workshop, pelatihan, dan pendidikan lanjutan. Selain itu, dukungan dari pemerintah, pengelola lembaga, dan orang tua menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi setiap anak usia dini dengan berbagai kebutuhan khusus yang dimiliki.

Guru PAUD memiliki harapan besar terhadap implementasi pendidikan inklusif, tetapi mereka juga menyadari berbagai keterbatasan yang ada. Guru menyadari peran mereka sebagai ujung tombak dalam penerapan pendidikan inklusif, tetapi pada saat yang sama mereka berharap adanya dukungan sistemik baik dari aspek pelatihan, sarana, kebijakan, maupun kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan inklusif di tingkat PAUD tidak hanya membutuhkan komitmen guru, tetapi juga kebijakan yang jelas, dukungan anggaran, serta keterlibatan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. R., Yuliani, S. Y. M., & Ashar, D. S. (2024). *Managing inclusive early childhood education: Strategies and challenges in supporting children with special needs*. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 27(2), 434–455. <https://doi.org/10.24252/lp.2024v27n2i10>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
- Fitria, A. W. (2024). *Meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di PAUD: Tantangan dan inovasi dalam penerapan pembelajaran inklusif*. *Jurnal Pelita PAUD*, 9(1), 1–10. <https://jurnal.umkuningan.ac.id/index.php/pelitapaud/article/view/4321>
- Fitria, N., Sulastri, E., & Wulandari, A. (2024). *Implementasi pendidikan inklusif di lembaga PAUD dalam meningkatkan layanan anak berkebutuhan khusus*. *Jurnal Pelita PAUD*, 9(2), 71–81. <https://jurnal.umkuningan.ac.id/index.php/pelitapaud/article/view/4321>
- Haekal, M. (2021). *Analisis implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, kebijakan, dan pelaksanaan*. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 117–130. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.176>
- Juliana, F. (2022, Agustus 31). *Banda Aceh belum serius terapkan pendidikan inklusif*. *DigData*. Diakses dari <https://digdata.id/baca/banda-aceh-belum-serius-terapkan-pendidikan-inklusi/>
- Kementerian Negara RI. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Moningka, C., Rahmi, F. N., & Wijayanti, S. (2024, Oktober 1). *Tantangan pendidikan inklusi di Indonesia*. *Buletin K-Pin*, 10(18). <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/236-vol-10-no-18-oktober-2024/1625-tantangan-pendidikan-inklusi-di-indonesia>
- Muchsin, M. A. (2023). *The Valuation of Inclusive Education Within Eastern Aceh (The Perspective and Expectation of Educational Elements in Langsa City, Aceh Tamiang Regency and Aceh Timur Regency)*. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31901>
- Novrizal, N., & Manaf, S. (2024). *The policy of inclusive education in Indonesia*. *Multicultural Islamic Education Review*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.23917/mier.v2i1.4297>
- Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Patilima, H. M., Rahayu, R. A., & Rahman, H. (2024). *Peningkatan kompetensi guru PAUD dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif melalui pelatihan berkelanjutan*. Jurnal Aplikasi Bina Bangsa, 5(1), 45–54. <https://www.jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/1070>
- Pasiningsih, P. (2024). *Challenges in Implementing Inclusive Education in an Indonesian Kindergarten: A Case Study*. ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 12(1).
- Putri, A. A., & Jailani, S. A. (2024). *Strategies and Challenges of Inclusive Education in Indonesia: Strategi dan Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Kebudayaan, 1(1), 152–165. https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/madrasah/article/view/135?utm_source=chatgpt.com
- Rawdhah, B. Y., & Julianto. (2017). *Sikap guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Khusus, 13(2), 45–52. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v3i2.3448>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Smith, T. E. C., Polloway, E. A., Patton, J. R., & Dowdy, C. A. (2020). *Teaching students with special needs in inclusive settings* (8th ed.). Pearson.
- UNESCO. (2021). *Inclusive education: Ensuring access to education for all*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378588>